

Dr. A. MUHAMMAD ASRUN, S.H.,M.H

POLITIK HUKUM PERS

Refleksi Kebebasan Pers

Perhimpunan

PUSAT STUDI HUKUM PUBLIK

Jakarta, April 2018

FREEDOM OF THE PRESS

Politik Hukum Pers
Refleksi Kebebasan Pers

Oleh:

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.

Diterbitkan:
Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik

Alamat : Jl. Pedati Raya No. 6, Jatinegara, Jakarta Timur.
Email : kajipublik@yahoo.co.id

Cetakan I : Jakarta, Desember 2017
(Ukuran 13,5x20), (xii + 240 hlm)

ISBN: 978-602-51148-1-6

ISBN 978-602-51148-1-6



Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

ABSTRAK

Kebebasan pers di Indonesia saat ini lebih baik dibanding masa sebelum reformasi. Meski demikian, masih terdapat produk hukum yang dianggap mengekang dan membatasi kebebasan pers serta terjadinya kriminalisasi terhadap insan pers. Untuk hal tersebut perlu untuk memahami bagaimana politik hukum dan penegakan hukum pers serta upaya pengembangan pers di Indonesia.

Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan peraturan perundang-undang, pendekatan historis, dan pendekatan literatur. Data dianalisis dan disajikan secara deskriptif analitis;

Politik hukum pers disandarkan pada UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan keseimbangan antara kebebasan berpendapat/berekspresi dan perlindungan kehormatan. Dalam penyelesaian sengketa pers, masyarakat belum menggunakan hak jawab dan mediasi karena dipersepsikan sebagai suatu yang dapat digunakan atau tidak digunakan. Belum ada persamaan persepsi antara insan pers, masyarakat dan penegak hukum/hakim tentang mekanisme penyelesaian sengketa pers. Oleh karena itu dibutuhkan advokasi kebijakan agar politik legislasi menghasilkan produk hukum yang memberikan perlindungan pada kebebasan pers. Memperkuat kelembagaan pers dan advokasi litigasi untuk memberikan perlindungan insan pers, mengembangkan fungsi dan peran dewan pers, lebih memfungsikan peran organisasi profesi wartawan dalam mengontrol para jurnalis.

ABSTRACT

The freedom of the press in Indonesia is better than pre-reform era. However, there are still legal products that are considered to curb and limit the freedom of the press and the criminalization of the press. For that matter it is necessary to understand how law politics and law enforcement press as well as efforts to develop the press in Indonesia.

The research used descriptive method with regulation approach, historical approach, and literature approach. The data is analyzed and presented analytically descriptively;

Legal Policy of press based on the Constitution which provides a balance between freedom of expression and honor protection. In the dispute resolution of the press, the public has not used the right of reply and mediation because it is perceived as being usable or unused. There is no similar perception among the press, public and law enforcement / judge about the mechanism of dispute resolution of the press. Therefore, policy advocacy is required in order for legislation politics to produce legal products that provide protection to the press freedom. Strengthen institutional press and litigation advocacy to provide for the protection of the press, to develop the function and role of the press council, to better function the professional organization of journalists in controlling the journalists.

berbagai diskusi, dan menulis buku. Buku, makalah, artikel yang pernah ditulis adalah sebagai berikut:

Buku

1. A.Muhammad Asrun, *Keadilan Substantif Dari Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Perhimpunan PSHP, 2015
2. A.Muhammad Asrun, *Perjuangan Hak Kependidikan, Sebuah Refleksi*. Jakarta: Perhimpunan PSHP. 2017
3. A.Muhammad Asrun, *Kebebasan Press di Era Reformasi*. Jakarta: Perhimpunan PSHP, 2016
4. A.Muhammad Asrun, *Potret Buram Peradilan*. Jakarta: Perhimpunan PSHP. 2016
5. A.Muhammad Asrun, *Perjuangan Hak-Hak Warga Negara di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Perhimpunan PSHP, 2016
6. A.Muhammad Asrun, *Putusan-putusan "Landmark" Sengketa Pemilu Kepala Daerah: Sebuah Catatan Prestasi*. Jakarta: Perhimpunan PSHP, 2016
7. A.Muhammad Asrun, *Keadilan Substantif Dari Mahkamah Konstitusi*, Edisi Revisi, Jakarta: Perhimpunan PSHP, 2015
8. A.Muhammad Asrun, *Sengketa Wilayah Jepang-Soviet*, Jakarta: Perhimpunan PSHP, 2015
9. A.Muhammad Asrun, *Monopoli Bulog Pada Masa Orde Baru*, Jakarta: Perhimpunan PSHP: 2015.

10. A. Muhammad Asrun, *Catatan Hukum Kasus Rekening 502*, Jakarta: Perhimpunan PSHP: 2015.
11. A. Muhammad Asrun, *Kasus BLBI: Perspektif hukum dan Ekonomi*, Jakarta: Perhimpunan PSHP: 2015.
12. A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Jakarta: ELSAM, 2004.
13. Sri Mamudji, A. Muhammad Asrun, et.al., *Indeks 1971-1988*. Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, FHUI, 1990.
14. A. Muhammad Asrun (ed.), *70 Tahun Ismail Suny Bergelut dengan Ilmu, Berkiprah dalam Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000).
15. A. Muhammad Asrun dan Hendra Nurtjahjo (eds.), *70 Tahun Prof. Dr. Harun Alrasid, Integritas, Konsistensi seorang Sarjana Hukum* (Jakarta: Pusat Studi HTN FHUI, 2000).
16. A. Muhammad Asrun (ed.), *Percikan Pemikiran tentang Hukum dan Demokrasi Abdul Bari Azed*. Jakarta: Pusat Kajian HTN FHUI, 2001.
17. A. Muhammad Asrun dan Heru, *Analisis Sosio-Yuridis Putusan Pengadilan Niaga* (Jakarta, Center Information for Law and Economic Studies, 2001).

Makalah

1. A. Muhammad Asrun, "Politik Hukum dalam Penegakan Hukum Lingkungan," (Program Studi